

Dr. Hendri: Membangun Rantai Pasok Nasional yang Tangguh

Updates. - KORLANTAS.ID

Jul 4, 2026 - 20:55



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Rantai pasok sering dianggap sekadar urusan mengangkut barang dari pabrik menuju pasar. Padahal, rantai pasok adalah sistem yang menghubungkan bahan baku, energi, mesin, teknologi, tenaga kerja, pembiayaan, pergudangan, transportasi, informasi, hingga produk diterima konsumen.

Selama semua berjalan lancar, keberadaan rantai pasok hampir tidak terlihat. Namun, ketika terjadi perang, pandemi, bencana alam, penutupan jalur pelayaran, kelangkaan kontainer, serangan siber, atau pembatasan ekspor oleh suatu negara, barulah kita menyadari betapa rapuhnya kegiatan ekonomi yang bergantung pada satu sumber pasokan.

Sebuah pabrik besar dapat berhenti hanya karena satu komponen kecil tidak tersedia. Produksi pangan dapat terganggu akibat kekurangan pupuk atau bahan baku kemasan. Rumah sakit dapat menghadapi kesulitan ketika obat, bahan farmasi, atau alat kesehatan terlambat tiba. Harga kebutuhan masyarakat dapat melonjak karena jalur distribusi terputus.

Karena itu, rantai pasok tidak boleh dipandang sebagai masalah teknis perusahaan semata. Rantai pasok merupakan bagian dari ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional.

Indonesia membutuhkan rantai pasok yang tidak hanya murah dan cepat, tetapi juga tangguh, beragam, terintegrasi, transparan, dan mampu bertahan ketika dunia mengalami guncangan.

Dunia Tidak Lagi Baik-Baik Saja

Perekonomian global sedang memasuki periode yang penuh ketidakpastian. Persaingan antarnegara semakin tajam, kebijakan perdagangan semakin protektif, konflik geopolitik mengganggu jalur energi dan pelayaran, sedangkan perubahan iklim memperbesar risiko bencana serta kegagalan produksi.

Bank Indonesia mencatat bahwa konflik geopolitik pada 2026 telah meningkatkan harga minyak dan komoditas dunia, mengganggu rantai pasok perdagangan antarnegara, memperlambat prospek pertumbuhan global, dan meningkatkan tekanan inflasi. [Bank Indonesia](#)

Situasi tersebut memberikan pelajaran penting. Efisiensi biaya tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam merancang rantai pasok. Selama beberapa dekade, perusahaan global membangun jaringan produksi berdasarkan prinsip biaya paling murah. Bahan baku diperoleh dari satu negara, komponen dibuat di negara lain, perakitan dilakukan di wilayah yang menawarkan biaya tenaga kerja rendah, sedangkan produk dipasarkan ke seluruh dunia.

Model itu efisien ketika keadaan normal. Namun, ketika satu simpul terganggu, seluruh jaringan dapat mengalami kelumpuhan. Rantai pasok yang terlalu ramping memang mengurangi biaya persediaan, tetapi dapat kehilangan kemampuan menghadapi keadaan darurat. Ketergantungan pada satu negara atau satu perusahaan pemasok terlihat efisien, tetapi menyimpan risiko strategis. Indonesia harus mulai menyeimbangkan efisiensi dengan ketahanan.

Ketergantungan Impor Perlu Dibaca dengan Jujur

Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku, bahan penolong, mesin, dan barang modal dari luar negeri. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa

sepanjang Januari–Februari 2026, nilai impor Indonesia mencapai US\$42,09 miliar. Dari jumlah tersebut, impor bahan baku dan penolong mencapai US\$29,40 miliar, sedangkan impor barang modal mencapai US\$9,10 miliar. Jika kedua kelompok itu digabungkan, nilainya mencapai lebih dari sembilan per sepuluh total impor Indonesia pada periode tersebut. [Badan Pusat Statistik](#)

Data ini tidak boleh ditafsirkan bahwa seluruh impor merupakan sesuatu yang buruk. Impor bahan baku dan mesin menunjukkan adanya kegiatan produksi, investasi, serta ekspansi usaha di dalam negeri.

Namun, besarnya ketergantungan tersebut juga memperlihatkan kerentanan struktur industri nasional. Apabila pasokan bahan baku, komponen, mesin, atau suku cadang dari luar negeri terganggu, kegiatan produksi di Indonesia dapat ikut berhenti.

Ketergantungan juga terkonsentrasi pada negara tertentu. Pada Januari–Februari 2026, Tiongkok menyumbang sekitar 42,46 persen dari impor nonmigas Indonesia. Sementara pada Januari 2026, produk yang banyak diimpor dari negara tersebut meliputi mesin dan peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik.

Ketergantungan terhadap satu negara dalam jumlah besar tidak selalu menjadi masalah selama hubungan perdagangan berjalan baik. Namun, konsentrasi tersebut harus dipandang sebagai risiko yang perlu dikelola.

Sepanjang Januari–Mei 2026, nilai impor Indonesia mencapai US\$111,33 miliar atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, ekspor hanya tumbuh 3,02 persen menjadi US\$115,36 miliar. [Badan Pusat Statistik](#)

Pertumbuhan impor yang jauh lebih cepat daripada ekspor harus menjadi peringatan agar Indonesia memperkuat kemampuan memproduksi bahan baku, komponen, mesin, dan produk antara yang dibutuhkan industrinya sendiri.

Rantai Pasok Bukan Hanya Jalur Barang

Ketangguhan rantai pasok ditentukan oleh beberapa aliran yang saling berhubungan. Pertama adalah aliran barang, mulai dari bahan mentah, produk antara, komponen, hingga barang jadi.

Kedua adalah aliran informasi, seperti data persediaan, permintaan, kapasitas produksi, jadwal pengiriman, dan risiko gangguan.

Ketiga adalah aliran keuangan, termasuk pembayaran, kredit modal kerja, pembiayaan persediaan, dan perlindungan asuransi.

Keempat adalah aliran teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan pemasok memenuhi standar, meningkatkan mutu, serta menyesuaikan produksi.

Kelima adalah aliran keputusan. Negara dan perusahaan harus mampu mengetahui apa yang terjadi serta mengambil tindakan dengan cepat ketika salah satu simpul terganggu.

Jika barang tersedia tetapi data tidak terhubung, distribusi menjadi lambat. Jika permintaan ada tetapi pembiayaan tidak tersedia, pemasok kecil tidak mampu meningkatkan kapasitas. Jika mesin tersedia tetapi teknisnya tidak ada, produksi tetap berhenti. Jika kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron, barang dapat tertahan oleh prosedur yang tumpang tindih.

Karena itu, membangun rantai pasok tidak cukup hanya dengan membangun jalan, pelabuhan, dan gudang. Indonesia harus membangun ekosistem yang menghubungkan produksi, logistik, data, pembiayaan, teknologi, dan pengambilan keputusan.

Tantangan Negara Kepulauan

Indonesia memiliki tantangan yang berbeda dari negara kontinental. Wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan membuat biaya distribusi menjadi bagian penting dari harga barang.

Bahan baku dapat berasal dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau Papua, sedangkan pusat pengolahan dan konsumsi masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, barang harus menempuh perjalanan panjang sebelum mencapai konsumen.

Tidak jarang bahan mentah dikirim dari daerah ke pusat industri, kemudian produk jadi dikirim kembali ke daerah asal. Pola tersebut membuat biaya transportasi berlipat dan memperbesar kesenjangan harga antarwilayah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut biaya logistik nasional pada 2026 masih berada pada kisaran 14 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun secara bertahap melalui penguatan sistem logistik yang terintegrasi, efisien, dan adaptif. [Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian](#)

Biaya logistik yang tinggi tidak hanya menjadi persoalan perusahaan. Pada akhirnya, biaya tersebut dibayar oleh masyarakat melalui harga barang yang lebih mahal.

Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, pusat logistik, dan kawasan industri memang penting. Namun, infrastruktur itu harus dihubungkan dalam jaringan multimoda.

Pelabuhan tidak akan efisien apabila akses jalannya macet. Kawasan industri tidak akan kompetitif apabila tidak mempunyai jalur angkutan barang. Sentra pertanian tidak akan berkembang apabila tidak terhubung dengan gudang berpendingin dan industri pengolahan.

Pembangunan infrastruktur harus mengikuti peta produksi dan distribusi, bukan sekadar dibangun sebagai proyek fisik yang berdiri sendiri.

Industri Kecil Harus Menjadi Bagian dari Rantai Besar

Rantai pasok nasional yang tangguh tidak dapat hanya ditopang oleh perusahaan besar. Indonesia membutuhkan jutaan pemasok kecil dan menengah yang tersebar di berbagai daerah.

Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 4,4 juta unit industri kecil dan menengah yang menyerap sekitar 13,4 juta tenaga kerja atau 65,38 persen tenaga kerja industri nasional. Namun, kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada triwulan pertama 2026 baru sekitar 21,55 persen. Industri besar masih menguasai sekitar 78,45 persen nilai tambah.

[Kementerian Perindustrian](#)

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah IKM sangat besar, tetapi produktivitas dan keterhubungannya dengan industri besar masih perlu diperkuat.

Banyak perusahaan besar memilih menggunakan komponen impor karena pemasok lokal dianggap belum mampu memenuhi standar kualitas, biaya, dan ketepatan pengiriman. Di sisi lain, IKM sulit meningkatkan mutu karena tidak mempunyai kepastian pesanan, pembiayaan, teknologi, dan informasi tentang kebutuhan industri.

Ini merupakan lingkaran yang harus diputus. Perusahaan besar perlu memberikan proyeksi permintaan, standar teknis, pendampingan, serta kontrak pembelian yang wajar kepada calon pemasok lokal. IKM kemudian menggunakan kepastian tersebut untuk meningkatkan mesin, keterampilan, sertifikasi, dan kapasitas produksi.

Program pengembangan pemasok atau *vendor development* harus menjadi kebijakan nasional, bukan hanya kegiatan sukarela perusahaan. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Vendor Development untuk mendorong hubungan antara IKM dan industri besar. Pelaksanaannya perlu diperluas, diukur, dan diawasi.

[Kementerian Perindustrian](#)

Keberhasilan program tidak boleh diukur dari jumlah seminar atau pertemuan bisnis. Ukurannya harus berupa jumlah kontrak, peningkatan nilai transaksi, peningkatan kualitas, dan bertambahnya pemasok nasional dalam rantai industri.

Murah Belum Tentu Aman

Dalam kondisi normal, membeli satu komponen dari pemasok termurah terlihat sebagai keputusan rasional. Namun, apabila pemasok tersebut berada di satu negara, menggunakan satu jalur pelayaran, dan tidak mempunyai alternatif, penghematan hari ini dapat berubah menjadi kerugian besar ketika terjadi gangguan.

Rantai pasok tangguh membutuhkan cadangan kapasitas. Perusahaan perlu mempunyai pemasok alternatif, rute pengiriman pengganti, persediaan minimum, serta rencana keberlanjutan bisnis.

Konsep ini tentu membutuhkan biaya. Menyimpan persediaan, membangun gudang, mengembangkan pemasok kedua, dan melakukan simulasi keadaan

darurat tidak gratis.

Namun, ketahanan memang mempunyai harga. Biaya tersebut harus dibandingkan dengan kerugian apabila produksi berhenti, pekerja dirumahkan, barang langka, atau pelayanan publik terganggu.

Tidak semua komoditas membutuhkan tingkat perlindungan yang sama. Barang biasa dapat tetap menggunakan sistem persediaan yang efisien. Tetapi pangan pokok, energi, obat, alat kesehatan, pupuk, bahan kimia strategis, semikonduktor, perangkat telekomunikasi, komponen pertahanan, dan infrastruktur digital memerlukan standar ketahanan yang lebih tinggi.

Negara harus menentukan barang serta layanan kritis berdasarkan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat, keberlangsungan pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.

Membangun Peta Kerentanan Nasional

Salah satu kelemahan Indonesia adalah belum terintegrasinya data rantai pasok secara menyeluruh. Data produksi, impor, persediaan, distribusi, kapasitas gudang, kebutuhan industri, dan konsumsi berada di berbagai lembaga serta perusahaan.

Akibatnya, pemerintah sering terlambat mengetahui bahwa suatu komoditas mulai langka. Kebijakan baru diambil setelah harga naik, pabrik mengurangi produksi, atau masyarakat kesulitan mendapatkan barang.

Indonesia membutuhkan Pusat Kendali Rantai Pasok Nasional yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan pusat koordinasi lintas sektor.

Pusat tersebut tidak harus mengambil alih seluruh kegiatan bisnis. Tugas utamanya adalah mengintegrasikan data strategis, memetakan ketergantungan, mendeteksi gangguan, dan membantu pengambilan keputusan.

Setiap komoditas strategis perlu mempunyai peta yang menjelaskan:

- Sumber bahan baku dan negara asal impor.
- Jumlah serta lokasi pemasok.
- Kapasitas produksi nasional.
- Ketergantungan pada mesin dan teknologi tertentu.
- Persediaan serta kebutuhan rata-rata.
- Jalur transportasi dan simpul logistik kritis.

- Alternatif sumber pasokan serta rute distribusi.
- Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan pasokan.
- Dampak ekonomi dan sosial apabila terjadi gangguan.

Dari peta tersebut, pemerintah dapat membangun indeks kerentanan rantai pasok. Komoditas yang mempunyai tingkat ketergantungan dan dampak tinggi harus mendapatkan perhatian lebih besar.

Digitalisasi Harus Menghubungkan, Bukan Menambah Aplikasi

Rantai pasok modern membutuhkan pertukaran data secara cepat. Namun, digitalisasi tidak boleh diartikan sekadar membuat aplikasi baru di setiap kementerian.

Indonesia memerlukan arsitektur informasi yang memungkinkan sistem pemerintah, pelabuhan, bea cukai, operator transportasi, pergudangan, industri, perbankan, dan pemerintah daerah saling bertukar data dengan standar yang sama.

Data tidak harus disimpan dalam satu tempat, tetapi harus dapat diakses berdasarkan kewenangan melalui mekanisme interoperabilitas yang aman.

Perusahaan dapat menyampaikan data agregat mengenai kapasitas dan persediaan strategis tanpa membuka seluruh rahasia dagangnya. Pemerintah memperoleh gambaran nasional, sedangkan pelaku usaha mendapatkan informasi yang membantu perencanaan produksi dan distribusi.

Sistem tersebut juga harus mempunyai perlindungan keamanan siber. Semakin terhubung sebuah jaringan, semakin besar pula risikonya terhadap serangan digital.

Rantai pasok nasional yang bergantung pada sistem informasi tanpa perlindungan siber dapat dilumpuhkan tanpa satu pun pelabuhan atau jalan dihancurkan.

Diversifikasi Pasokan dan Produksi Dalam Negeri

Ketahanan tidak berarti Indonesia harus memproduksi semua kebutuhan sendiri. Tidak ada negara modern yang sepenuhnya mandiri dari perdagangan internasional.

Namun, Indonesia tidak boleh menggantungkan kebutuhan strategisnya pada satu negara, satu perusahaan, atau satu jalur pengiriman.

Strateginya harus memadukan empat pendekatan. Pertama, memperkuat

produksi dalam negeri untuk barang yang secara ekonomi dan strategis layak dibuat di Indonesia.

Kedua, melakukan diversifikasi negara pemasok agar gangguan di satu wilayah tidak melumpuhkan industri nasional.

Ketiga, membangun persediaan strategis untuk komoditas yang waktu pemulihan pasokannya panjang.

Keempat, mengembangkan kemampuan substitusi agar industri dapat menggunakan bahan atau komponen alternatif ketika pasokan utama terganggu.

Substitusi impor juga harus dilakukan secara selektif. Pemerintah perlu memprioritaskan produk yang mempunyai nilai impor besar, pasar domestik jelas, kemampuan teknologi yang dapat dibangun, serta dampak luas terhadap industri lainnya.

Kebijakan tidak boleh hanya menghasilkan pabrik yang bergantung pada perlindungan permanen. Dukungan harus disertai target produktivitas, kualitas, harga, kandungan lokal, dan kemampuan ekspor.

Pembiayaan Rantai Pasok

Banyak pemasok kecil sebenarnya mampu menghasilkan barang berkualitas, tetapi tidak mempunyai modal kerja yang cukup untuk memenuhi pesanan besar.

Mereka harus membeli bahan baku, membayar pekerja, dan menjalankan produksi terlebih dahulu, sementara pembayaran baru diterima beberapa minggu atau beberapa bulan setelah barang dikirim.

Kondisi ini membuat kontrak besar justru dapat menjadi beban bagi usaha kecil. Indonesia perlu memperluas pembiayaan rantai pasok atau *supply chain financing*. Bank dapat memberikan kredit berdasarkan kontrak pembelian dari perusahaan besar atau pemerintah. Faktur yang telah diverifikasi dapat dijadikan dasar pembiayaan.

Perusahaan besar juga harus menjaga waktu pembayaran kepada pemasok. Menunda pembayaran mungkin memperbaiki arus kas perusahaan besar, tetapi dapat menghancurkan pemasok kecil.

Negara perlu mendorong ketentuan pembayaran yang adil, transparan, dan dapat dipantau. Hubungan rantai pasok harus dibangun sebagai kemitraan, bukan hubungan yang menempatkan pemasok kecil pada posisi selalu lemah.

Logistik Pangan Membutuhkan Perhatian Khusus

Rantai pasok pangan berbeda dengan barang industri biasa. Produk pertanian mudah rusak, produksi dipengaruhi musim, dan permintaan masyarakat berlangsung setiap hari.

Indonesia dapat mengalami kelebihan produksi di satu daerah, tetapi kekurangan

di daerah lain karena informasi, penyimpanan, transportasi, dan pengolahan tidak terhubung.

Petani sering menjual murah ketika panen raya, sedangkan konsumen tetap membeli dengan harga tinggi. Selisih tersebut menunjukkan adanya masalah dalam rantai pasok, bukan semata-mata kekurangan produksi.

Negara perlu memperkuat gudang, pengering, penggilingan, rumah kemas, transportasi berpendingin, pusat distribusi, dan industri pengolahan di dekat wilayah produksi.

Data panen dan kebutuhan harus tersedia secara waktu nyata agar keputusan distribusi dan impor tidak terlambat atau justru merugikan petani.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menempatkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sebagai landasan penyelenggaraan pangan nasional. Amanat tersebut tidak akan tercapai tanpa jaringan produksi dan distribusi yang mampu menjangkau seluruh wilayah.

Peraturan.go.id

Cadangan pangan juga harus dikelola secara dinamis. Persediaan bukan sekadar disimpan, tetapi diputar secara teratur agar mutu terjaga dan biaya penyimpanan dapat dikendalikan.

Membangun Simpul Produksi di Berbagai Daerah

Rantai pasok nasional akan rapuh apabila kegiatan produksi terlalu terkonsentrasi di satu wilayah. Bencana alam, gangguan energi, kemacetan, atau masalah infrastruktur di wilayah tersebut dapat berdampak pada seluruh Indonesia.

Pemerintah perlu mengembangkan beberapa simpul produksi untuk komoditas strategis. Setiap wilayah dapat dibangun berdasarkan keunggulan sumber daya, posisi geografis, keterampilan tenaga kerja, dan akses pasar.

Industri pengolahan perlu ditempatkan lebih dekat dengan sumber bahan baku agar biaya pengangkutan berkurang dan nilai tambah tinggal di daerah.

Namun, pemerataan industri tidak berarti membangun pabrik yang sama di semua wilayah. Setiap daerah harus memiliki spesialisasi yang saling melengkapi dan terhubung dalam jaringan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri dapat menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan kawasan industri yang lebih terintegrasi dengan potensi wilayah, infrastruktur, dan kebutuhan nasional. Peraturan.go.id

Dengan pendekatan tersebut, rantai pasok juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

Negara Harus Menjadi Pengarah

Pasar mempunyai kemampuan mengatur pasokan, tetapi tidak selalu memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan risiko nasional. Perusahaan cenderung memilih pemasok berdasarkan harga, kualitas, dan keuntungan. Negara harus melihat dimensi yang lebih luas: ketahanan pangan, energi, kesehatan, lapangan kerja, pemerataan wilayah, penguasaan teknologi, dan keamanan nasional.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Semangat kemandirian tersebut tidak berarti menolak impor. Kemandirian berarti mempunyai kemampuan untuk menjaga kebutuhan rakyat dan kegiatan ekonomi ketika hubungan internasional mengalami gangguan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga memberikan landasan bagi pembangunan struktur industri nasional yang kuat, mandiri, sehat, berdaya saing, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Peraturan.go.id

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional masih menjadi salah satu landasan pengembangan logistik. Namun, kerangka tersebut perlu terus diperbarui menghadapi perdagangan digital, risiko geopolitik, perubahan iklim, keamanan siber, dan kebutuhan integrasi data masa kini. Peraturan.go.id

Agenda Ketahanan Rantai Pasok

Indonesia memerlukan agenda nasional yang dapat dilaksanakan secara terukur. Pertama, membentuk sistem informasi dan pusat kendali rantai pasok nasional yang mengintegrasikan data strategis dari pemerintah serta dunia usaha.

Kedua, menetapkan daftar barang dan layanan kritis berdasarkan tingkat ketergantungan, waktu pemulihan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketiga, memperkuat produksi bahan baku, produk antara, mesin, komponen, serta teknologi strategis di dalam negeri.

Keempat, mewajibkan proyek industri besar mempunyai program pengembangan pemasok nasional dengan target kontrak yang jelas.

Kelima, memperluas pembiayaan rantai pasok bagi IKM melalui kredit berbasis kontrak dan faktur.

Keenam, mengembangkan sistem transportasi multimoda yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, gudang, pelabuhan, dan pasar.

Ketujuh, membangun cadangan strategis dan sumber pasokan alternatif untuk pangan, energi, obat, pupuk, semikonduktor, serta kebutuhan kritis lainnya.

Kedelapan, melakukan simulasi gangguan rantai pasok secara berkala.

Pemerintah dan industri harus mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi penutupan pelabuhan, kelangkaan energi, serangan siber, atau bencana besar.

Kesembilan, memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pada seluruh infrastruktur logistik dan produksi.

Kesepuluh, menerbitkan dasbor ketahanan rantai pasok yang mengukur biaya logistik, tingkat ketergantungan, jumlah pemasok lokal, konsentrasi sumber pasokan, waktu pemulihan, dan kesiapan cadangan.

Tanpa ukuran yang jelas, ketahanan hanya akan menjadi slogan.

Ketangguhan adalah Kemampuan untuk Bangkit

Rantai pasok tangguh bukan rantai yang tidak pernah terganggu. Tidak ada sistem yang sepenuhnya bebas dari krisis. Rantai pasok yang tangguh adalah jaringan yang mampu mendeteksi gangguan lebih awal, menahan dampaknya, beradaptasi, dan pulih dengan cepat.

Indonesia mempunyai modal besar untuk membangunnya: sumber daya alam yang beragam, pasar domestik yang luas, jutaan pelaku usaha, posisi geografis strategis, dan basis industri yang terus berkembang.

Namun, modal tersebut harus dihubungkan dalam satu arsitektur nasional. Petani harus terhubung dengan industri pangan. IKM harus terhubung dengan perusahaan besar. Pelabuhan harus terhubung dengan jalur kereta dan kawasan industri. Data pemerintah harus terhubung dengan kebutuhan dunia usaha. Perguruan tinggi harus terhubung dengan persoalan teknologi industri. Pembiayaan harus terhubung dengan kontrak produksi.

Rantai pasok tidak boleh lagi tumbuh secara terpisah menurut kepentingan sektoral. Krisis global telah mengajarkan bahwa negara yang hanya mengandalkan pasar internasional akan mudah terguncang. Sebaliknya, negara yang mempunyai produksi domestik, sumber pasokan beragam, cadangan strategis, data yang akurat, serta kemampuan mengambil keputusan cepat akan lebih mampu melindungi rakyatnya.

Membangun rantai pasok nasional yang tangguh memang membutuhkan biaya dan waktu. Namun, biaya ketidaksiapan akan jauh lebih besar. Ketahanan ekonomi tidak dimulai ketika krisis datang. Ketahanan dibangun jauh sebelumnya—melalui data, produksi, infrastruktur, pemasok, teknologi, cadangan, dan kerja sama yang direncanakan dengan disiplin.

Rantai pasok yang tangguh adalah urat nadi negara industri. Tanpanya, pabrik dapat berhenti, harga dapat melonjak, dan kebutuhan rakyat dapat terganggu.

Dengan rantai pasok yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga mempunyai dasar untuk tumbuh sebagai bangsa yang mandiri, produktif, dan berdaulat.

Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)